

**PENGARUH *SIZE* PEMERINTAH, *INTERGOVERNMENTAL
REVENUE*, BELANJA DAERAH DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Miftakhul Janah
NIM 15.0102.0102

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**PENGARUH *SIZE* PEMERINTAH, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*,
BELANJA DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2017)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Miftakhul Janah
NIM 15.0102.0102

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

**PENGARUH *SIZE* PEMERINTAH, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, BELANJA DAERAH
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Miftakhul Janah

NPM 15.0102.0102

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **14 Agustus 2019**.....

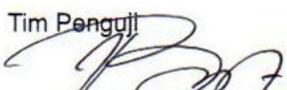
Susunan Tim Penguji

Pembimbing

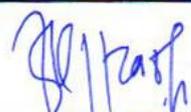

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. Ak.
Pembimbing I


Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak.
Pembimbing II

Tim Penguji


Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak.
Ketua


Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak.
Sekretaris


Muji Mranani, S.E., M.Si., Ak., CA.
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftakhul Janah
NIM : 15.0102.0102
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH *SIZE* PEMERINTAH, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*,
BELANJA DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2017)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjananya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 27 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,



Miftakhul Janah
NIM. 15.0102.0102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Miftakhul janah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 15 Desember 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Nglarangan Getas Kaloran Temanggung
Alamat Email : Miftakhuljanah001@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar (2002-2008) : SD Negeri 3 Getas
SMP (2008 - 2011) : SMP Negeri 2 Kaloran
SMA (2011 - 2014) : SMA Negeri 3 Temanggung
Perguruan Tinggi (2015-2019) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non formal

- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer Universitas Muhammadiyah Magelang
- *Basic Listening and Speaking Course* di Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 27 Agustus 2019
Peneliti



Miftakhul janah
NIM. 15.0102.0102

MOTTO

“ Jadikanlah sabar dan Shalat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ”
(Q.S Al - Baqarah : 45)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al - Baqarah : 286)

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”
(Q.S Al - Insyirah : 6-7)

“Live as if yaou were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever”
(Mahatma Gandhi)

“Belajarlah disaat orang lain tidur, bekerjalah disaat orang lain bermalas-malas, mempersiapkan disaat orang bermain dan bermimpilah saat orang lain berharap”
(William Arthur Ward)

“Kamu percaya akan ada pelangi setelah hujan, kamu juga harus percaya akan ada kebahagiaan setelah perjuangan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limbahan rahmat, hidayah, karunia-Nya seta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: **“PENGARUH *SIZE* PEMERINTAH, *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*, BELANJA DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta dan keluarga besar terimakasih atas segala do'a, kasih sayang, nasehat, semangat dan dukungan baik moral ataupun material.
2. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, Mt. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus dosen pembimbing 1 yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
5. Ibu Yulinda Devi Pramita, SE., M.Sc., Ak. selaku dosen pembimbing 2 yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen penguji yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berhadap semoga karya sederhana ini bisa memberikan manfaat. Semoa Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Akhirnya penyusun berhadap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Magelang, 27 Agustus 2019

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miftakhul Janah', with a large, sweeping flourish extending to the right.

Miftakhul Janah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Daftar Riwayat Hidup	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar/Gafik	xi
Daftar Lampiran	xii
Abstrak	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	122
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sitematika Pembahasan.....	133

BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori	14
1. Teori Stewardship (<i>Stewardship Theory</i>).....	14
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
3. <i>Size</i> Pemerintah	17
4. <i>Intergovernmental revenue</i>	18
5. Belanja Daerah	21
6. Belanja Modal	222
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	24
C. Perumusan Hipotesis	27
D. Model Penelitian	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Data Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	34
D. Metode Analisis Data.....	35
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	35
2. Uji Asumsi Klasik	36
3. Analisis Regresi Linear Berganda	38
4. Pengujian Hipotesis	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian.....	43
B. Statistik Deskriptif	44
C. Uji Asumsi Klasik	47
1. Uji Normalitas	47
2. Uji Multikolinearitas	48
3. Uji Autokolerasi	48
4. Uji Heteroskedastisitas	50
D. Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
E. Uji Hipotesis.....	53
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	53
2. Uji F (Goodness of Fit).....	53
3. Uji t.....	54
F. Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan penelitian	65
C. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Opini LKPD Kab/Kota Jawa Tengah 2013-2017.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	34
Tabel 3.2 Pengambilan keputusan Ada Tidaknya Autokolerasi	37
Tabel 4.1 Metode Pengambilan Sampel Penelitian.....	43
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	47
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas setelah Outlayer	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokolerasi	49
Tabel 4.7 Hasil <i>Run Test</i>	49
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>Glesjer</i>	50
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Glesjer</i> setelah Pengobatan.....	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	51
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	53
Tabel 4.12 Hasil Uji <i>Goodness Of Fit</i>	53
Tabel 4.13 Hasil Uji t.....	54

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Kinerja Keuangan Pemda Kab/Kota di Jateng 2013-2017	8
Gambar 2.1 Model Penelitian	32
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F	40
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis Positif	41
Gambar 3.3 Penerimaan Hipotesis Negatif	42
Gambar 4.1 Hasil Penerimaan Uji F	54
Gambar 4.2 Uji t Variabel <i>Size</i> Pemerintah	55
Gambar 4.3 Uji t Variabel <i>Intergovernmental Revenue</i>	55
Gambar 4.4 Uji t Variabel Belanja Daerah	56
Gambar 4.5 Uji t Variabel Belanja Modal	56

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Daftar sampel penelitian.....	70
LAMPIRAN 2. Data-data Variabel Penelitian.....	72
LAMPIRAN 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif	89
LAMPIRAN 4. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	90
LAMPIRAN 5. Hasil Uji Hipotesis	93
LAMPIRAN 6. Tabel Uji Durbin Watson	94
LAMPIRAN 7. Tabel F.....	95
LAMPIRAN 8. Tabel t.....	96

ABSTRAK

PENGARUH *SIZE* PEMERINTAH, *INTERGOVERNMENTAL* REVENUE, BELANJA DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa
Tengah Periode 2013-2017)**

**Oleh:
Miftakhul Janah**

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan studi empiris. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Size pemerintah, intergovernmental revenue, belanja daerah dan belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai daerah, baik pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam penyelenggaraan perekonomian, setiap daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengelola karena Indonesia menganut asas desentralisasi dengan adanya Otonomi Daerah yang mulai resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Prayitno (2012), lahirnya otonomi merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan yaitu sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Ayuningsih, 2016). Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah (Minarsih, 2015). Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi

pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri (Nasution, 2010).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya terkhusus keuangannya dapat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Hal tersebut tercermin dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas kepada publik (Ayuningsih, 2016). Akuntabilitas bukan hanya kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik sekedar dibelanjakan, namun harus dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien (Indrawan, 2013).

Size pemerintah daerah bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat atas akuntabilitas kerjanya akan semakin besar sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Agustina, 2018). Meningkatnya total aset pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan secara efisien.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa

pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat. Kenyataan yang terjadi adalah masih tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah penerimaan Dana Perimbangan masing-masing daerah masih diatas 50 persen, dengan rata-rata persentase Dana Perimbangan yang diterima sebesar 61,76 persen (statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2013-2017, data diolah kembali).

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk Belanja Modal belum mencapai 30 Persen sesuai ketentuan Pedoman Penyusunan APBD yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan melihat realisasi penggunaan dana APBD untuk Belanja Pegawai pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 memiliki rata-rata sebesar 56 persen, sementara untuk realisasi Belanja Modal sebesar 17 persen dari anggaran APBD (Pratiwi, 2018). Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah (statistik keuangan Pemda Jateng).

Semakin besar belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja daerah, maka akan semakin baik pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah salah

satunya dapat terlihat dari pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dijalankan. Pemerintah daerah menggunakan dananya untuk belanja modal sebagai langkah meningkatkan produktivitas jangka panjang (Agustina, 2018).

Menurut Halim (2012), mendefinisikan kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengomunikasikan strategi dengan baik, indikator ketercapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, menginformasikan manajer dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009). Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja bisa digunakan sebagai ukuran keberhasilan aktivitas dari suatu kegiatan selama periode tertentu (Azhar, 2009). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah hakikatnya tidak hanya sebagai bentuk pengendalian, namun juga membantu semua pengguna laporan keuangan pemerintah daerah termasuk masyarakat untuk dapat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Nugroho & Prasetyo, 2018).

Penilaian terhadap keberhasilan laporan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya bergantung pada opini yang diberikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK atas 542 LKPD pada Tahun 2018 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 411 (76%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas

113 (21%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 18 (3%) LKPD. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 33 dari 34 pemerintah provinsi (97%) dari 415 Pemkab (72%), dan 80 target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah provinsi (IHPS I 2018, BPK).

Peningkatan opini WTP dari tahun 2013 sampai dengan 2017 bertolak belakang dengan LHP yang diselesaikan oleh BPK pada semester I tahun 2018. Dimana masih ditemukannya permasalahan sebesar 15.773 permasalahan, meliputi 7.539 (48%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.030 (51%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 10,06 triliun, serta 204 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan senilai Rp 1,49 triliun (IHPS I 2018,BPK).

Terdapat delapan pemerintah daerah yang mengalami ketidaklengkapan dalam pengungkapan laporan keuangan, daerah tersebut antara lain Kota Salatiga, Kota Magelang, Kab Demak, Kab Rembang, Kab Cilacap, Kab Pemasang, Kab Batang, dan Kab Purbalingga. Ketidaklengkapan pengungkapan dalam laporan keuangan antara lain disebabkan oleh kekurangan kas yang belum ditetapkan, terdapat piutang macet pada BUMD yang statusnya dalam proses penegakkan hukum sehingga belum dapat diketahui secara pasti jumlah yang terealisasi. Terdapat aset tanah yang tidak dapat diyakini kewajarannya, tidak diketahui keberadaannya, bersertifikat ganda,dan tidak dapat dibandingkan dengan Kartu Inventaris Barang.

Terdapat aset tetap jalan, irigrasi dan jaringan yang belum dicatat, lemahnya pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap tanah dan pengelolaan dana BOS (www.bpk.go.id).

Laporan keuangan di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun ini dari tahun 2015-2017 menerima opini WTP dari BPK. Hasil opini yang didapatkan oleh Pemerintah Jawa Tengah menunjukkan bahwa laporan keuangan dari Pemerintah Jawa Tengah transparan dan bebas dari salah saji material. Hal tersebut merupakan bukti dari Pemerintah Jawa Tengah mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, yang akan menjadikan kinerja keuangan di Provinsi Jawa Tengah baik. LHP atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013-2017 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.1
Hasil Opini LKPD Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2017

	2013 (Kab/Kota)	2014 (Kab/Kota)	2015 (Kab/Kota)	2016 (Kab/Kota)	2017 (Kab/Kota)
WTP	7	6	20	30	31
WTP DPP	3	5	-	-	-
WDP	25	24	25	5	4
Jumlah	35	35	35	35	35

Sumber: IHPS I 2018, BPK

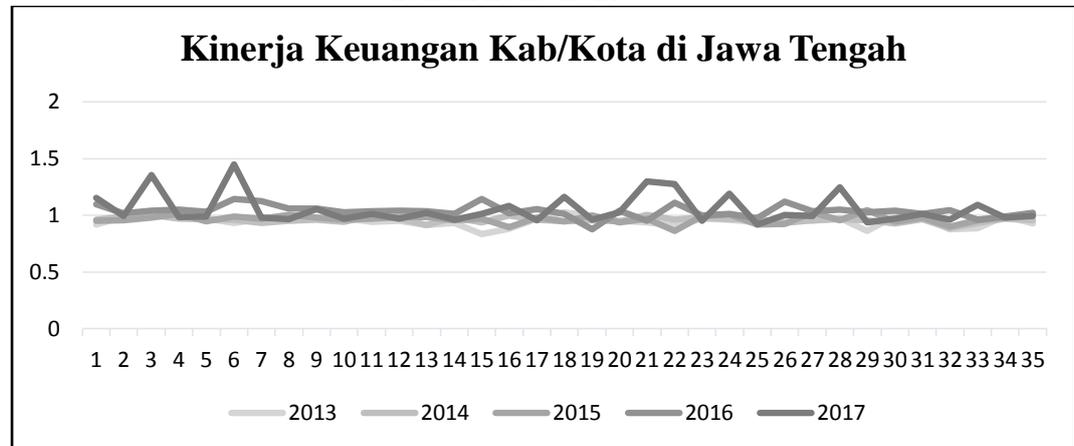
Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil opini LKPD di Jawa Tengah dari Tahun 2013-2017 dari setiap tahunnya mengalami peningkatan terhadap peraih hasil WTP. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan adanya kenaikan kualitas LKPD yang didukung oleh upaya-upaya Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hasil peraih peringkat WDP terdapat Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah yang dalam kurun waktu lima tahun ini tidak mengalami peningkatan dari hasil opini LKPD. Pemerintah Jawa Tengah diharapkan lebih untuk melakukan perbaikan terhadap Kabupaten/Kota yang masih mendapatkan opini WDP selama lima tahun berturut-turut, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan di Jawa Tengah untuk tahun-tahun selanjutnya.

Menurut Pratiwi (2018), Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, meskipun terdapat *surplus* atau *defisit* untuk selisih antara pendapatan dan belanja. *Surplus* atau *defisit* bukanlah menjadi kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Dapat dilihat dari seberapa efisien pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.

Merujuk informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Jawa Tengah tahun 2017, pendapatan daerah Jateng mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada 2016, realisasi pendapatan daerah naik sebesar Rp2.804 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi tahunan Jateng lebih rendah daripada inflasi nasional. Pada tahun 2014, inflasi Jateng berada pada 8,22 , turun drastis menjadi 2,73% ditahun 2015, dan kembali menurun menjadi 2,36 % pada tahun 2016. Berikut kinerja keuangan 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dari tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2013-2017



Sumber: Data Keuangan Daerah, Direktorat EPIKD 2013-2017

Berdasarkan pada grafik diatas menunjukkan fluktuasi kinerja keuangan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama 5 tahun. Dari hasil menunjukkan perbedaan bervariasi antara 0,8 sampai dengan 1,4. Kinerja keuangan yang berada dibawah 1 menunjukkan kinerja keuangan yang efisien. Kinerja keuangan yang berada diatas 1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan tersebut tidak efisien. Rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar 0,99. Tahun 2016 dan 2017 rata-rata kinerja keuangan melebihi angka 1 yaitu sebesar 1.03 dan 1.05 yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangannya tidak efisien karena pengeluaran lebih besar dibandingkan penerimaan pada setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah masih memberikan hasil yang berbeda-

beda. Penelitian Nugroho & Prasetyo (2018) tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menyatakan bahwa *size* pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Alvini, (2018) dan Febrianto, (2018) menunjukkan bahwa *size* pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini & Erawati, (2016) dan Achmad, (2017) menunjukkan bahwa *size* pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Febrianto, (2018) meneliti terkait pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Retnowati, (2016) dan Achmad *et al*, (2017) bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun Penelitian Nugroho & Prasetyo, (2018) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Armaja *et al*, (2015) dan Andirfa *et al*, (2016) yang menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Armaja *et al*, (2015) tentang pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa

belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Retnowati, (2016) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Nugroho & Prasetyo, (2018) yang menunjukkan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al*, (2016) tentang pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Alvini, (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Febrianto, (2018) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Prasetyo (2018). Persamaan penelitian yaitu menggunakan semua variabel yang ada. Perbedaannya yaitu **pertama**, menambahkan variabel belanja modal, karena pemerintah daerah dengan semakin meningkatnya alokasi belanja modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al* (2016). Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Banyaknya dana yang dialokasikan untuk belanja modal maka nantinya diharapkan dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang

semakin baik dan tepat. Dengan dialokasikannya dana belanja modal dengan baik akan menjadikan belanja modal tersebut lebih efisien dan juga akan menambah aset atau kekayaan daerah, sehingga semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kedua, objek penelitian yang digunakan, yaitu pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Alasannya karena dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas opini audit untuk daerah di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat. Masih terdapat beberapa daerah yang kinerja keuangannya selama lima tahun berturut-turut masih mempunyai masalah ketidaklengkapan informasi yang diungkapkan pada LKPD. Dan juga terdapat pendapatan dan pengeluaran yang fluktuasi pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa tengah dalam waktu 5 tahun sehingga kinerja keuangan tidak efisien. **Ketiga**, menambah periode dari tahun 2013-2018 yang penelitian sebelumnya dilakukan 4 tahun. Alasannya agar dapat digunakan sebagai perbandingan antar tahun serta diharapkan hasil penelitian ini bisa digeneralisasikan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *size* pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *size* pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

D. Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi ilmiah dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi sektor publik terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi rujukan untuk mengkaji kembali peraturan yang telah diberlakukan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. Sitematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan bentuk ringkas dari keseluruhan penelitian serta gambaran dari permasalahan yang diteliti yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS, bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis dalam penelitian ini. Bab ini juga akan menggambarkan model dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta metoda analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan program SPSS berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN, bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Jika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. *Steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Anton, 2010).

Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan *non profit* lainnya. Organisasi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principal*. Rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*, yang merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan jujur pada pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak mempunyai informasi khususnya dalam

bidang keuangan, diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang diberikan rakyat (Nosihana & Yaya, 2016).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat. Dan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanatkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah daerah yang bertindak sebagai *steward*, maka rakyat selaku *principal* akan merasa puas dengan kinerja pemerintah (Anton, 2010).

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2012) kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan yang hendak atau sudah tercapai. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, menuntut adanya akuntabilitas pemerintah dengan mengetahui kualitas kinerja dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

Kualitas kinerja pemerintah dapat diketahui dengan ukuran yang sudah ditetapkan sebagai acuan atau tolok ukur. Penelitian ini akan

membahas mengenai kinerja keuangan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Menurut Halim (2012) pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. APBD di dalamnya secara langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas- tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Menurut Halim (2012) terdapat beberapa analisis rasio di dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah:

- a. Rasio Derajat Desentralisasi
- b. Rasio Kemandirian Keuangan daerah
- c. Rasio Efektivitas
- d. Rasio Efisiensi
- e. Rasio Aktivitas
- f. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

3. *Size* Pemerintah

Size pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah (Hartono, 2014). *Size* merupakan suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu objek tertentu (Kusuma *et al*, 2017). Suatu organisasi dapat diketahui besarnya melalui *size* organisasi tersebut. *Size* suatu organisasi dapat diketahui melalui sudut pandang fisik maupun non fisik. Dihubungkan dengan pengukuran kinerja, maka suatu organisasi tidak bisa diukur dari fisiknya, akan tetapi harus diukur dari non fisiknya.

Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan yang sah antara lain:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Size yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Kemudahan di dalam bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan

aset yang besar di asumsikan mempunyai potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat.

4. *Intergovernmental revenue*

Menurut Darise (2008), dana perimbangan merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali.

Intergovernmental revenue dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, akuntabel, serta memberikan kepastian keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan (Pratiwi, 2018).

Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari :

- (1) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat 90% untuk daerah.
- (2) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
- (3) Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Menurut Darise (2008), DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan

ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan daerah. Fungsi DAU adalah sebagai pemerataan kapasitas fiskal.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima Dana Alokasi Umum yang relatif besar (Pratiwi, 2018).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Pratiwi (2018), DAK merupakan bagian dari dana perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Digunakan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah.

Menurut Darise (2008), *Intergovernmental revenue* selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan

pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan secara rata-rata di daerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 % dari penerimaan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun (Andirfa *et al*, 2016).

5. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Darise, 2008). PSAP No.2 Paragraf 7, mengatur bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Armaja *et al*, 2015).

Menurut Bastian (2006), secara umum prosedur belanja daerah bertujuan untuk memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang

berkaitan dengan pendekatan informasi. Pendekatan informasi mengenai belanja, mulai dari pengakuan sampai proses pencatatan, dan memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada sehingga pemda dapat menghitung tingkat pengeluaran.

Menurut Halim (2012), klasifikasi belanja daerah yang digunakan dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.
- b. Belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigrasi dan jaringan belanja aset tetap lainnya.

6. Belanja Modal

Belanja modal menurut Halim (2012), merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Mardiasmo (2009), belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk

memperoleh atau menambah nilai aset tetap atau lainnya yang memiliki masa manfaat lebih satu periode akuntansi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, komponen pengeluaran yang dapat digolongkan ke dalam belanja modal adalah pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Komponen-komponen belanja modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian, balik nama atau sewa tanah, pengosongan, perataan, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja modal gedung

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal peralatan dan mesin

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja modal jalan, irigrasi dan jaringan

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan dan pembangunan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, pembangunan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Armaja <i>et al</i> (2015)	Pengaruh kekayaan daerah, belanja dana perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan	<p>a. Kekayaan daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah</p> <p>b. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja</p>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Hasil
2	Masdiantini & Erawati (2016)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> , temuan audit bpk pada kinerja keuangan	<p>keuangan pemerintah daerah</p> <p>a. Ukuran pemerintah dan opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah</p> <p>b. Kemakmuran dan <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
3	Andirfa <i>et al</i> (2016)	Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan PAD terhadap kinerja keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh	<p>a. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan</p> <p>b. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan</p> <p>c. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
4	Retnowati, (2016)	Analisis pengaruh tingkat kekayaan daerah, <i>leverage</i> , dan <i>intergovernmental revenue</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	<p>a. Belanja daerah dan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda</p> <p>b. Tingkat kekayaan dan <i>intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda</p>
5	Achmad <i>et al</i> , (2017)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, <i>intergovernmental revenue</i> , dan hasil audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	<p>a. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Hasil
6	Alvini, (2018)	Pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	<p>b. <i>Intergovernmental revenue</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>a. Ukuran pemerintah, tingkat kekayaan daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>b. Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah</p>
7	Febrianto, (2018)	Pengaruh ukuran pemerintah, PAD, belanja modal, ukuran legislatif dan <i>intergovernmental revenue</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	<p>a. Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>b. Pad, belanja modal, <i>intergovernmental revenue</i> dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</p>
8	Nugroho & Prasetyo, (2018)	Pengaruh karakteristik daerah terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur	<p>a. <i>Size</i> pemerintah dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>b. <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>

Sumber : Beberapa jurnal dan artikel yang diolah, 2019

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh *Size* Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Size pemerintah daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah (Hartono, 2014). *Size* suatu organisasi dapat diketahui melalui sudut pandang fisik maupun non fisik. Dihubungkan dengan pengukuran kinerja, maka suatu organisasi tidak bisa diukur dari fisiknya, akan tetapi harus diukur dari non fisiknya. *Size* yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai.

Size pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut yang diukur menggunakan total aset dari suatu pemerintah. Dengan jumlah aset yang lebih besar diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang memiliki jumlah aset yang lebih sedikit. Akan tetapi harus didukung oleh pemerintah (*steward*) yang mengelola aset daerah dengan sebaik-baiknya agar yang direncanakan suatu daerah dapat tercapai kinerjanya. Pemerintah daerah dengan jumlah aset yang besar diasumsikan dapat memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat (*principal*). Tercapainya tujuan pemerintah melalui kinerja yang dilakukan dalam mengelola aset dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdianti & Erawati (2016) bahwa *size* pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Achmad *et al*, (2017) yang menunjukkan bahwa *size* pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₁. Size Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Darise (2008), dana perimbangan merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, akuntabel, serta memberikan kepastian keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan (Pratiwi, 2018).

Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah (Darise, 2008). Dana

perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana keseimbangan secara rata-rata di daerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80% dari penerimaan daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit (Andirfa *et al*, 2016).

Stewardship theory, pemerintah daerah berperan sebagai *steward* yang mengelola keuangan daerah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat mempertanggungjawabkan kepada publik. Pemerintah (*steward*) harus dapat menciptakan sistem yang adil dan akuntabel terhadap kinerja keuangan pemerintah, sehingga dapat tercapai tujuan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (*principal*). Akan tetapi pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah (*steward*) harus dapat mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya dan dapat dialokasikan dengan benar. Semakin besar *intergovernmental revenue* yang diterima daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Penelitian yang dilakukan Armaja *et al* (2015), bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut dikuatkan oleh penelitian Andirfa *et al* (2016) menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh

negatif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂. Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

3. Pengaruh Belanja daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah (Halim, 2012). Secara umum prosedur belanja daerah bertujuan untuk memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan pendekatan informasi (Bastian, 2006). Pendekatan informasi mengenai belanja, mulai dari pengakuan sampai proses pencatatan, dan memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada sehingga pemda dapat menghitung tingkat pengeluaran.

Pelaksanaan otonomi memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali sumber yang ada sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya. Melalui pengalokasian belanja daerah yang memadai, kualitas kinerja keuangan daerah dapat ditingkatkan. Pemerintah daerah (*steward*) sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan fungsi dalam pemerintahan harus bertanggungjawab dalam mengelola belanja daerah, guna memenuhi pelayanan terhadap masyarakat (*principal*). Apabila dari pemerintahan (*steward*) dapat bertanggungjawab dalam mengelola belanja daerah dengan baik, maka kinerja keuangan daerah dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Armaja *et al* (2015) menunjukkan hasil bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Retnowati, (2016) bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H₃. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Ulum & Sofyani (2016), Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin. Jenis belanja tersebut seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum, kelompok belanja mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik (Mardiasmo, 2009).

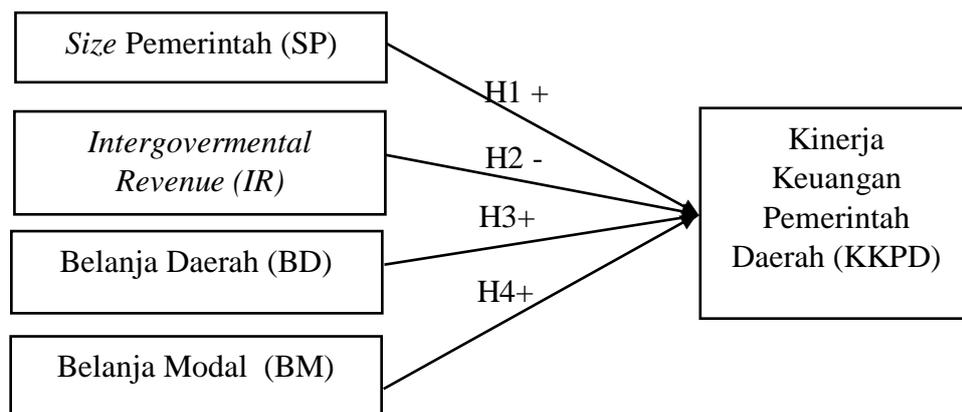
Pemerintah sebagai *steward* dituntut untuk mengelola belanja modal dengan baik dan juga tepat sasaran agar pelayanan kepada masyarakat dapat optimal. Pengelolaan belanja modal yang optimal tersebut membutuhkan kerjasama antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) agar memberikan kepuasan bagi publik serta dapat mendukung

terciptanya kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah yang sebagai *steward* berkewajiban untuk mengelola belanja modal sesuai dengan kepentingan rakyat, dan mengedepankan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Apabila dari sarana dan prasarana memadai, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Semakin tinggi belanja modal suatu daerah maka semakin meningkat pula tingkat efisiensi terhadap kinerja keuangan di suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al* (2016) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Alvini (2018) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dirumuskan hipotesis:

H₄. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III METODA PENELITIAN

A. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan yang selanjutnya diolah menjadi angka rasio untuk kemudian dianalisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa APBD, RAPBD dan Neraca Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai metode untuk pengumpulan data. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data, dari dokumen tersebut peneliti mengambil data berdasarkan dokumen yang menjadi sumber seperti informasi APBD, RAPBD dan Neraca yang diperoleh melalui website (www.djpk.kemenkeu.go.id).

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan

dengan pendekatan *purposive sampling* untuk menentukan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan berdasarkan kriteria – kriteria tertentu (Sugiyono, 2012). Adapun kriteria dalam pengambilan sampel, yaitu:

- 1) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan APBD,RAPBD dan neraca melalui www.djpk.kemenkeu.go.id selama tahun 2013-2017.
- 2) Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, belanja modal dan belanja daerah.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
1	Variabel Dependen		
	Kinerja Keuangan Pemda	Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Halim, 2012).	Rasio Efisiensi = Realisasi pengeluaran / Realisasi pendapatan (Mahsun, 2006)
2	Variabel Independen		
	a. <i>Size</i> Pemerintah	<i>Size</i> pemerintah daerah merupakan salah satu karakteristik pemerintah daerah. <i>Size</i> pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintahan (Mutih, 2018).	<i>Size</i> pemerintah daerah = Total Aset (Mutih, 2018)

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran variabel
(Lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
	b. <i>Intergovernmental Revenue</i>	<i>Intergovernmental Revenue</i> merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan Pemda dari transfer Pemerintah Pusat (Sumarjo, 2010)	<i>Intergovernmental Revenue</i> = Total dana perimbangan / total pendapatan (Sumarjo, 2010)
	b. Belanja Daerah	Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah (Halim, 2012).	Belanja daerah = Total Realisasi belanja daerah (Halim, 2012)
	c. Belanja Modal	Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Halim & Kasufi, 2012).	Rasio Belanja Modal = Total realisasi belanja modal (Simatupang, 2016)

Sumber : diolah dari berbagai jurnal & artikel, 2019

D. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis ini memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak

bermaksud menguji hipotesis. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari variabel-variabel tersebut (Ghozali, 2018).

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengakui distribusi normal. Apabila dalam asumsi ini di langgar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2018).

Uji statistik untuk mendeteksi residual terdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

- (1) Jika nilai probabilitas $>$ taraf signifikan yang ditetapkan (0,05), maka data terdistribusi secara normal.
- (2) Jika nilai probabilitas $<$ taraf signifikan yang ditetapkan (0,05), maka data tidak terdistribusi secara normal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji *Multikolinearitas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya *multikolinearitas* dalam model regresi dapat digunakan nilai *tolerance* dan lawanya *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* < 0,01 atau sama dengan nilai VIF > 10 dan tingkat kolerasi antar variabel diatas 95% maka terjadi *multikolinearitas* dalam model regresi (Ghozali, 2018).

c) Uji Autokolerasi

Uji *Autokolerasi* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t -1 (sebelumnya). Model regresi yang baik merupakan yang bebas *autokorelasi*. Salah satu cara untuk mengetahui apakah model regresi mengandung *autokorelasi* atau tidak dapat menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) (Ghozali, 2018).

Uji *Durbin Watson* hanya digunakan untuk *autokorelasi* tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya *autokolerasi* variabel independen adalah:

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada <i>autokolerasi</i> positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada <i>autokolerasi</i> positif	<i>No decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada kolerasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada kolerasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du < d < 4 < dl$
Tidak ada <i>autokolerasi</i> positif dan negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber :Ghozali, (2018)

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedestisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homokedastisitas*. Model regresi yang baik tidak terjadi *heterokedastisitas* (Ghozali, 2018).

Pengujian dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu dengan meregres variabel independen dengan *absolut residual* terhadap variabel dependen. Kriteria Uji *Glejser* pada model regresi adalah sebagai berikut:

- (1) Jika nilai *Sig.* < 0,05, maka mengindikasikan terjadi heterokedastisitas,
- (2) Jika nilai *Sig.* > 0,05, maka mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, teknik analisis ini sesuai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keterkaitan antara beberapa variabel. Tujuan analisis regresi yaitu untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2018). Penelitian ini untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi sebagai berikut:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 SP + \beta_2 IR + \beta_3 BD + \beta_4 BM + e$$

Keterangan:

KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α = *Konstanta*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = *Koefisien regresi*

SP = *Size* Pemerintah

IR = *Intergovernmental revenue*

BD = Belanja Daerah

BM = Belanja Modal

e = Tingkat Kesalahan

4. Pengujian Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2018).

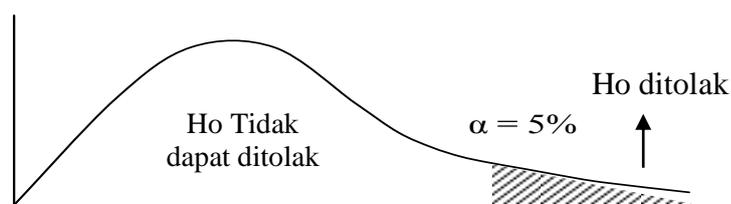
Menurut Ghozali (2018), jika dalam uji empiris terdapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$ maka adjusted $R^2 = 1$ sedangkan jika $R^2 = (1-k) / (n-k)$, jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai

negatif. Apabila nilai *Adjusted R²* mendekati nol, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai *Adjusted R²* mendekati satu, maka variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependennya.

b) Uji F (*Goodness Of Fit*)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji kelayakan model atau *goodness of fit model* (Ghozali, 2018). Pengujian F_{tabel} dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df) = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = $n-k-1$, dimana k adalah jumlah variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

- (1) Jika $f_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, atau $p \text{ Value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan cocok (*fit*).
- (2) Jika $f_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak cocok (*tidak fit*).



Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

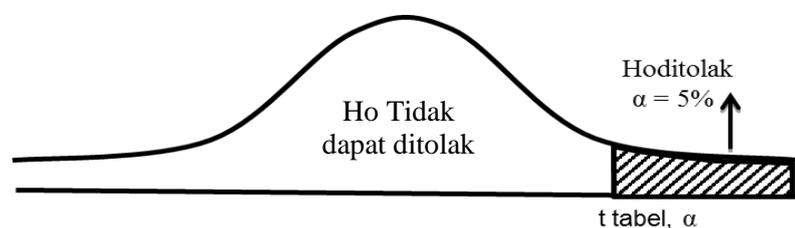
c) Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). *Level of significant* pada taraf = 5% dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam $df = n-1$ yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*).

(1) Kriteria penerimaan hipotesis positif :

(a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

(b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

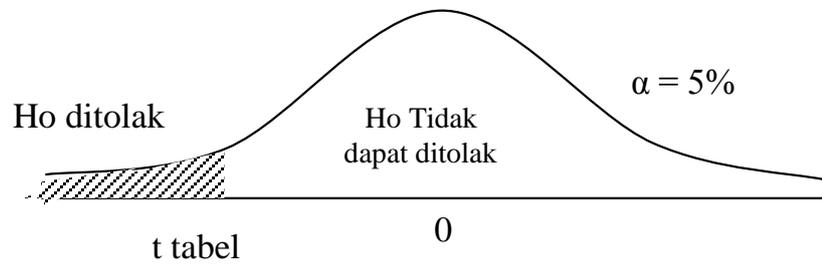


Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis Positif

(2) Kriteria penerimaan hipotesis negatif :

(a) Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

(b) Jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3.3
Penerimaan Hipotesis Negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang diambil dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 20 (dua puluh) sampel yang terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kota dengan periode waktu selama 5 (lima) tahun.

Hasil *Adjusted R²* menunjukkan hasil bahwa variabel independen yang terdiri dari *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan belanja modal mampu menjelaskan variasi variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 44%, sedangkan sisanya 56% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari pada F tabel, artinya mampu menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah secara baik dan model yang digunakan dalam penelitian ini sudah bagus (*fit*). Hasil uji t menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

B. Keterbatasan penelitian

1. Penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu *size* pemerintah, *intergovernmental revenue*, belanja daerah dan belanja modal yang hanya mampu menjelaskan 44% faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Sampel yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah, hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.
3. Periode sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sehingga masih diperlukan generalisasi dalam mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti opini audit BPK, karena semakin baik opini audit maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja keuangan pemerintah daerah (Masdianti & Erawati, 2016)
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti Provinsi lain yang memiliki kinerja keuangan daerah yang tinggi agar dapat memperbandingkan dengan Kabupaten dan Kota yang berbeda.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian agar mampu dilakukan generalisasi atas data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad *et al.* (2017). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Hasil Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22.
- Agustina, L. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. *Skripsi*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Alvini, Y. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom Feb*, 1(1), 1–14.
- Andirfa *et al.* (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 8(5), 30–38.
- Armaja *et al.* (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(September), 168–181.
- Ayuningsih, D. (2016). Pengaruh Size , Wealth, Leverage, Belanja Daerah dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Azhar, S. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko, Pengembangan*. Edisi Pertama. Bandung : Lingga Jaya.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi sektor Publik*. Jakarta: PT Indeks.
- Donaldson, L., & Davis. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory : CEP Governance and Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16.
- Febrianto, N. (2018). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Ukuran Legislatif dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Naskah Publikasi*, 15(2).
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Halim, & Kasufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Keenam)*. Jakarta Salemba empat.
- Hartono, R. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Semarang : FE UNNES.
- <http://www.BPK.go.id>, diakses 9 Maret 2019
- <http://www.jatengprov.go.id>, diakses 9 Maret 2019
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, diakses 30 April 2019
- Indrawan, Y. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Universitas Hasanudin*.
- Kusuma *et al.* (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi.*, 6(1), 403–420.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1150–1182.
- Minarsih, R. (2015). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, dan Intergovernmental Revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Mutiha, A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2).
- Nasution, I. (2010). Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan. *STKIP Bina Bangsa Getsempena*, I, 1–9.

- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Prayitno. (2012). Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Retnowati, R. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Naskah Publikasi*.
- Simatupang, F. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Sumatera: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Surakarta : UNS.
- Ulum, & Sofyani. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Yogyakarta: Aditya Media.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah* . Jakarta.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

_____. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.* Jakarta